




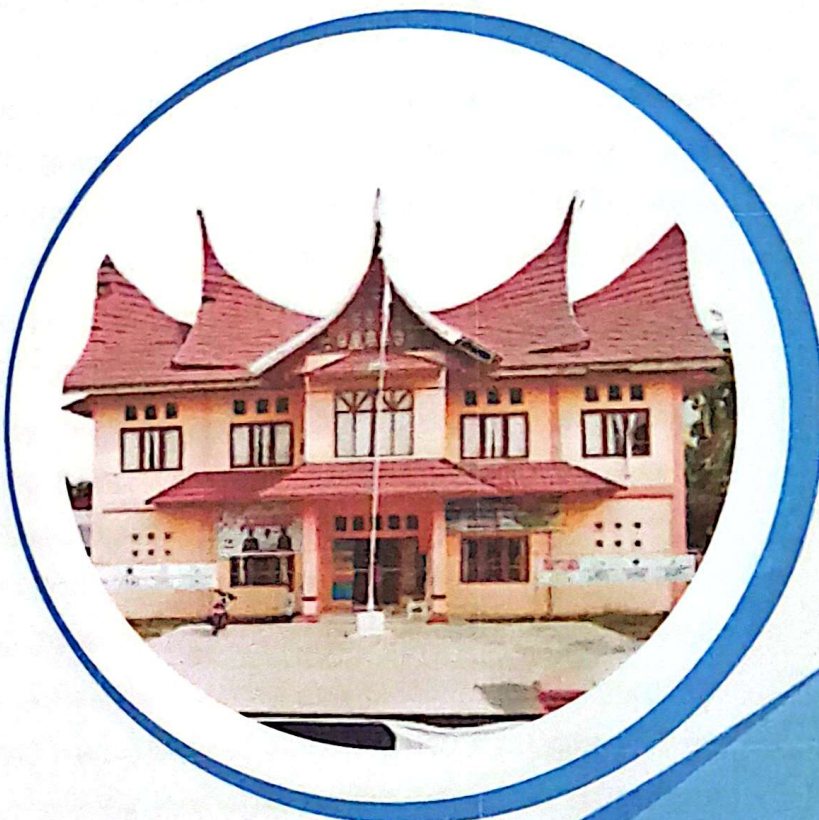
LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2025

Duacipilasi Tgl. 26/2024
/2


Apri Junardi, SE, M. A.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian target kinerja organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

LKjIP ini disusun sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat, guna menciptakan sistem pelaporan kinerja yang transparan, terukur, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendorong peningkatan kinerja instansi dalam menjalankan misi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Akhirnya, diharapkan informasi yang tersaji dalam LKjIP Kantor Camat Lunang ini dapat memberikan masukan yang konstruktif serta menjadi umpan balik (feedback) bagi perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja, guna mewujudkan Good Local Governance di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan LKjIP ini.

Lunang, 23 Februari 2026
CAMAT LUNANG,

Daniel Agustian, S.ST., M.CIO.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19830816 200502 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Lunang atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas kepada Bupati Pesisir Selatan dan masyarakat.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Lunang sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan. Selain itu, LKjIP disusun sebagai wujud akuntabilitas kepada pemberi mandat dan publik, serta sebagai instrumen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Secara umum, penyusunan LKjIP Kecamatan Lunang Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden tentang SAKIP, serta Peraturan Menteri PANRB terkait pedoman evaluasi dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam LKjIP ini dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran strategis. Pengukuran didasarkan pada indikator kinerja yang mencerminkan aspek input, output, dan outcome, yang bersumber dari pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan serta dukungan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Lunang sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketentraman dan ketertiban umum. Sasaran strategis Kecamatan Lunang selaras dengan tujuan dan

sasaran RPJMD yang menitikberatkan pada terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas, masyarakat yang berdaya, serta wilayah yang aman dan kondusif.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Lunang telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen antara Camat dengan Bupati Pesisir Selatan. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja organisasi. Adapun ringkasan capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Kecamatan Lunang Tahun 2025

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (79,2)	B (63,72)	80,45%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	90,16	103,63%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	94	125,33%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	100%	100%	100,00%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	100,00%
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	5,00%	4,80%	104,17%
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	100%	100,00%	100,00%
Rata-rata Capaian Indikator					101,94%

Rata-rata capaian indikator kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 101,94%, yang menunjukkan bahwa secara umum target kinerja telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan lebih lanjut, khususnya pada nilai AKIP.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Ke depan, Kecamatan Lunang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta menjaga konsistensi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSKLUSIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Tujuan	1
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	4
1.5. Landasan Hukum	6
1.6. Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Kecamatan Lunang	8
2.2. Rencana Kinerja	11
2.3. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	17
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	18
3.3. Capaian Kinerja Kecamatan Lunang.....	19
3.4. Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025	iv
Tabel 1.1	Komposisi ASN Kantor Camat Lunang Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.1	Komposisi ASN Kantor Camat Lunang Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasatan Strategis	10
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan	11
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, IKU dan Program Pendukung	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
Tabel 2.5	Program dan Anggaran Tahun 2025	15
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama 2025	16
Tabel 3.1	Klasifikasi dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja	18
Tabel 3.3.1	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2025	19
Tabel 3.3.2	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun Sebelumnya	20
Tabel 3.3.3	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja Nilai AKIP dengan Renstra	20
Tabel 3.3.4	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja Nilai AKIP dengan Standar Nasional	21
Tabel 3.3.5	Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024	
Tabel 3.3.6	Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran Indikator Nilai AKIP	26
Tabel 3.3.7	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator IKM Tahun 2025	28
Tabel 3.3.8	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja IKM dengan Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.3.9	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja IKM dengan Renstra	30
Tabel 3.3.10	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja IKM dengan Standar Nasional	31
Tabel 3.3.11	Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran Indikator IKM	32
Tabel 3.3.12	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kematangan Inovasi Tahun 2025	34
Tabel 3.3.13	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Tahun Sebelumnya	35
Tabel 3.3.14	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja Nilai Kematangan Inovasi dengan Renstra	36
Tabel 3.3.15	Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran Indikator Nilai Kematangan Inovasi	38

Tabel	3.3.16	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025	39
Tabel	3.3.17	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Beberapa Tahun Terakhir	43
Tabel	3.3.18	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari dengan Renstra	44
Tabel	3.3.19	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025	45
Tabel	3.3.20	Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran Kegagalan Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025	46
Tabel	3.3.21	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Konflik yang Diselesaikan Tahun 2025	48
Tabel	3.3.22	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan dengan Tahun Sebelumnya	48
Tabel	3.3.23	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan dengan Tahun-tahun Sebelumnya	49
Tabel	3.3.24	Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan dengan Standar Nasional	50
Tabel	3.3.25	Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran Indikator Persentase Konflik yang Diselesaikan Tahun 2025	51
Tabel	3.3.26	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Kantor Camat	3
Gambar	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	29
Gambar	3.2	Banner Inovasi Lunang Terpadu	34
Gambar	3.3	Surat Sekertariat Daerah terkait Hasil Nilai Inovasi 2025	36
Gambar	3.4	Surat Bupati Terkait Kemiskinan Ekstrim	41
Gambar	3.5	Lampiran Rekap Data Stunting Pesisir Selatan Tahun 2025	42
Gambar	3.6	Laporan Penyelesaian Konflik	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Lunang merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

LKjIP merupakan ikhtisar yang memuat capaian kinerja instansi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan serta pelaksanaan APBD. Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja.

Dalam kerangka SAKIP yang dilaksanakan secara berjenjang, Kecamatan Lunang berkewajiban menyusun LKjIP secara terukur dan akuntabel. LKjIP memuat informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi target kinerja, serta gambaran umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Lunang disusun sebagai instrumen akuntabilitas, pengukuran, dan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Penyusunan LKjIP

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Lunang adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Lunang selama Tahun Anggaran 2025.

LKjIP disusun guna menyampaikan informasi kinerja secara sistematis, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Dokumen ini menjadi bentuk pertanggungjawaban resmi atas tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai refleksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama satu tahun anggaran.

B. Tujuan Penyusunan LKjIP

Tujuan penyusunan LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Lunang meliputi dua aspek utama, yaitu aspek akuntabilitas kinerja dan aspek manajemen kinerja.

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan LKjIP bertujuan sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Lunang kepada pihak eksternal, baik kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat. LKjIP melaporkan capaian kinerja yang telah diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Melalui pelaporan ini, dapat diketahui sejauh mana target yang direncanakan telah terealisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaiannya.

2. Aspek Manajemen Kinerja

Dari sisi manajemen internal, LKjIP bertujuan sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi. Dokumen ini digunakan oleh manajemen Kecamatan Lunang untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan perbaikan, penyempurnaan perencanaan, serta peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

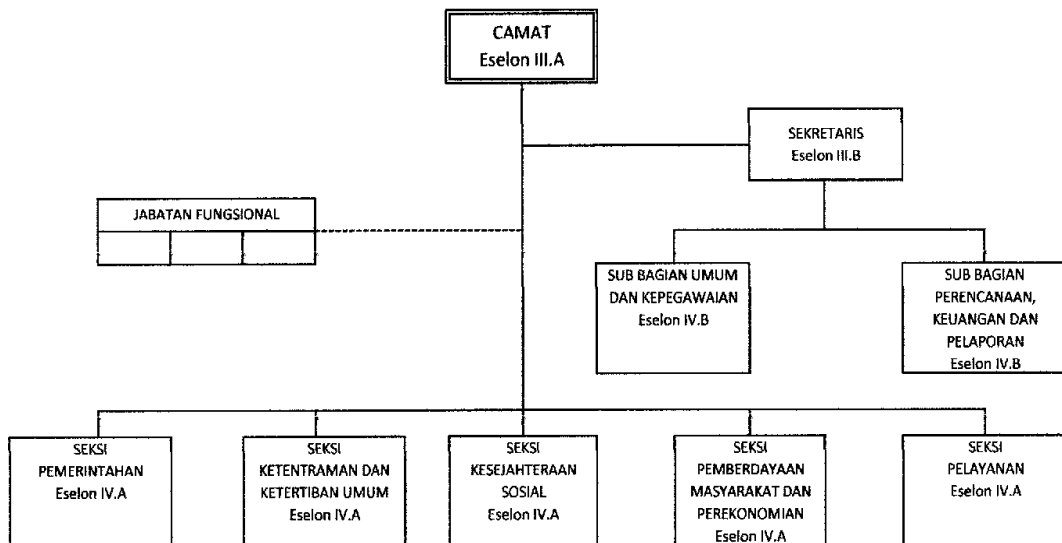
- a) Camat
- b) Sekretariat, membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f) Seksi Pemerintahan;
- g) Seksi Pelayanan; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Kantor Camat Lunang dapat dilihat pada Bagan di bawah ini :

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Kecamatan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN
TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Jumlah Aparatur/Pegawai Kantor Kecamatan Lunang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur Kecamatan Lunang
Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Keadaan 1 Januari 2025 (orang)	Keadaan 31 Desember 2025 (orang)
IV	2	2
III	8	10
II	-	-
I	-	-
PPPK	-	1
Jumlah	14	14

Sumber : Bezzeting Pegawai

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Tabel 1.2
Komposisi Aparatur Kecamatan Lunang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2025 (orang)	Keadaan 31 Desember 2025 (orang)
S2	2	2
S1	6	8
D3	2	2
D4	-	-
SMA	-	1
Jumlah	10	13

Sumber : Bezzeting Pegawai

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai kawasan transmigrasi, Kecamatan Lunang memiliki posisi strategis dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Karakteristik wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian menjadikan Lunang sebagai salah satu kawasan strategis ekonomi berbasis perkebunan kelapa sawit. Komoditas ini merupakan mata pencaharian utama masyarakat sekaligus penggerak utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian sawit perlu diarahkan pada penerapan teknologi tepat

guna, penguatan manajemen usaha tani, serta peningkatan produktivitas dan kualitas hasil agar mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Di samping sektor pertanian, Kecamatan Lunang juga memiliki potensi strategis di bidang pariwisata budaya. Salah satu aset budaya yang menjadi daya tarik utama adalah Rumah Gadang Mande Rubiah yang terletak di Nagari Lunang. Situs bersejarah ini telah berdiri sejak tahun 1520 M dan memiliki nilai historis yang erat kaitannya dengan perjalanan Bundo Kandung beserta keluarga dan pengikutnya dari Pagaruyung ke Tanah Menang (Nagari Lunang). Keberadaan warisan budaya ini menjadikan Lunang sebagai destinasi wisata budaya yang diminati wisatawan domestik. Pengelolaan yang profesional, promosi yang berkelanjutan, serta sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi tersebut agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang perlu mendapat perhatian. Sinkronisasi antara program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi organisasi belum sepenuhnya optimal, sehingga capaian kinerja belum maksimal. Selain itu, kebutuhan personel yang belum terpenuhi serta kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi geografis Kecamatan Lunang yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, dengan waktu tempuh sekitar empat hingga lima jam perjalanan, juga menjadi tantangan tersendiri dalam hal koordinasi, akses layanan, dan percepatan implementasi kebijakan.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Lunang ke depan, dengan fokus pada peningkatan kinerja organisasi, penguatan pelayanan publik, serta optimalisasi potensi wilayah secara berkelanjutan.

1.5 LANDASAN HUKUM

Penyusunan LkjIP Kecamatan Lunang Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pada dasarnya LKjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Lunang selama Tahun 2025. Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Lunang Tahun 2025 sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang instansi serta uraian singkat data apa yang dibebankan kepada instansi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka menengah (strategis), dalam Rencana Jangka Tahunan (RKT) dan dalam Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUNANG

Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyelaraskan visi dan misi dengan memperhatikan potensi, tantangan, peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja. Kecamatan Lunang sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 untuk membentuk dan mewujudkan visi Bupati Pesisir Selatan dan menetapkan kinerja tahun 2025.

Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kepala Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Visi dan Misi

1) Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintah yang Akuntabel dan Profesional”

2) Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021-

2026 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan

1) Tujuan

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Terciptanya sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur memadai.
3. Menghasilkan Aparatur yang disiplin
4. Menghasilkan Aparatur yang mempunyai kapasitas Sumber Daya yang baik.
5. Terlaksananya Pembangunan Wilayah Kecamatan.
6. Tertatanya Administrasi Kependudukan Akuntabel
7. Terwujudnya Wawasan Kebangsaan yang tinggi
8. Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
9. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari yang efektif, efisien dan akuntabel.
10. Berkembangnya Pariwisata melalui pemasaran.

2) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terstruktur yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Lunang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Lunang di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari
5. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Lunang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	87
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100%
			Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%
			Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,00%
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100%

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Lunang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rencana kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target capaian, serta program dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap nagari/desa di wilayah Kecamatan Lunang.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten, serta kemampuan keuangan daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk memberikan gambaran yang lebih terukur dan sistematis, Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Lunang disajikan dalam Tabel 2.3 tentang Rencana Kinerja Tahunan serta Tabel 2.4 mengenai Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Program Pendukung, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	87
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,00%
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100%

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Lunang menetapkan lima sasaran kinerja utama yang menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Sasaran pertama adalah terwujudnya pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan berkinerja, dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah yang ditargetkan mencapai predikat BB (79,2). Sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai 87.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif, Kecamatan Lunang menargetkan peningkatan kualitas inovasi daerah dengan capaian Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan sebesar 75. Pada aspek pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari, ditetapkan target 100 persen nagari memiliki administrasi yang baik, angka kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen, serta prevalensi stunting (EPPGM) sebesar 5,00 persen. Selain itu, untuk menjaga stabilitas wilayah, Kecamatan Lunang menargetkan 100 persen konflik yang terjadi di wilayah kecamatan dapat diselesaikan secara efektif.

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut, Kecamatan Lunang telah menetapkan Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) serta program pendukung yang relevan dan terarah. Adapun rincian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Program Pendukung Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, IKU, dan Program Pendukung

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM PENDUKUNG
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Angka Kemiskinan Ekstrem	
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Berdasarkan tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Program Pendukung, Kecamatan Lunang menetapkan lima sasaran strategis sebagai arah utama pelaksanaan kinerja Tahun 2025. Sasaran pertama adalah terwujudnya pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan berkinerja, yang diukur melalui Nilai AKIP Perangkat Daerah dan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Selanjutnya, peningkatan kualitas inovasi daerah diukur melalui Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari, indikator yang digunakan meliputi persentase nagari yang memiliki administrasi baik, angka kemiskinan ekstrem, serta prevalensi stunting (EPPGM), yang didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun untuk menjaga ketenteraman dan stabilitas wilayah, sasaran diukur melalui persentase konflik yang diselesaikan dan didukung oleh Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Keseluruhan sasaran, indikator, dan program tersebut disusun secara terpadu agar setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2025.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Lunang telah membuat penetapan kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini telah mengacu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026. Penetapan Kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	87
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,00%
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100%

Sumber : *Perjanjian Kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2025*

Dalam penyusunan LkjIP Kecamatan Lunang tahun 2025, terdapat perbedaan mendasar antara Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lunang tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa dalam Renstra, ada sasaran dan indikator kinerja yang tidak dicantumkan, sedangkan dalam PK, kedua elemen tersebut terdapat secara jelas dan terukur.

Perbedaan ini terjadi karena pada tahun 2025, terdapat penajaman dan spesifikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran kinerja. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang menghendaki dokumen perencanaan yang lebih operasional dan berbasis hasil. Oleh karena itu, dalam PK, sasaran dan indikator kinerja dirumuskan secara lebih spesifik untuk memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan PK ini dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan kebijakan strategis yang berlaku serta kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya sasaran dan indikator dalam PK, pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berbasis data.

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Kecamatan Lunang disusun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran pada masing-masing program diarahkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil, selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Setiap program yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja utama (IKU), sehingga penggunaan anggaran tidak hanya berfokus pada penyerapan, tetapi juga pada pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien. Rincian program dan alokasi anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Lunang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.634.608.748	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.468.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28.681.500	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.127.000	APBD
JUMLAH		1.708.885.248	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2025

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Lunang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (selanjutnya disebut IKU) secara berjenjang. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines proses* tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama 2025

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Formulasi	Sumber Data	PJ Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nilai AKIP Kecamatan Lunang	Tanpa Satuan	BB (79,2)	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Semua OPD	Sekcam, Kasubbag PKP
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	87	Rata-rata Nilai Pelayanan Publik	Kasi Pelayanan, Kasubbag Umum	Kasi Pelayanan, Kasubbag Umum
3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Lunang	Tanpa Satuan	75	Nilai Kematangan dari Bappedalitbang	Kasi Pelayanan, Kasubbag PKP	Kasi Pelayanan, Kasubbag PKP
4.	- Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi dan Kinerja Baik	%	100%	Hasil Evaluasi Nagari	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
	- Angka Kemiskinan Ekstrim		0%	Presentase angka kemiskinan ekstrim	Kasi Kesos, Kasi Ekobang	Kasi Kesos, Kasi Ekobang
	- Prevalensi Stunting (EPPGM)		5,00%	Hasil dari Prevalensi	Kasi Kesos, Kasi Ekobang	Kasi Kesos, Kasi Ekobang
5.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	%	100%	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik}}$	Kasi Trantib	Kasi Trantib

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1. Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan Lunang Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kecamatan Lunangserta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kerja yang ditetapkan.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Lunang dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja

No.	MISI, TUJUAN, SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI	CAPAIAN
Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Transparan						
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi						
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)	B (63,72)	80,45%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	87	90,16	103,63%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75	94	125,33%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100%	100%	100,00%
		Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%	0%	100,00%
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,00%	4,80%	104,17%
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100%	100,00%	100,00%
Rata-rata Capaian Indikator						101,94%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 7 (Tujuh) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan sasaran yang ditetapkan tahun 2025, sebanyak 5 sasaran dan 7 indikator memiliki nilai rata-rata capaian nya sebesar 101,94 % dengan predikat **Sangat Baik**.

3.3 Capaian Kinerja Pemerintahan Kecamatan Lunang

Adapun tingkat capaian kinerja pemerintah Kecamatan Lunang pada tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Kecamatan Lunang.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Lunang Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)	*B (63,72)	80,45%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3.1 di atas dapat dilihat Nilai AKIP Kecamatan Lunang Tahun 2025 masih menggunakan Nilai AKIP Kecamatan Lunang Tahun 2024 dikarenakan Nilai AKIP Kecamatan Lunang Tahun 2025 belum tersedia. Nilai AKIP Kecamatan Lunang Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis akuntabilitas kinerja juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja

dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.2.
Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	70,1 (B)	78,29 (BB)	111,68	75 (BB)	78,85 (BB)	99,56	BB (79,2)	B (63,72)	80,45

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.2 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 97,23%. pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kecamatan Lunang pada tahun 2022 realisasinya 78,29 (BB); tahun 2023 realisasinya 78,85 (BB) dan tahun 2024 adalah 63,72 (B).

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Renstra	Realisasi Renstra	Capaian Renstra
			2024	2024	2024	2025	2025	2025
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	79,2 (BB)	B (63,72)	80,45	79,2 (BB)	*B (63,72)	*80,45

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra dikategorikan tinggi. Walaupun masih ada program kegiatan yang masih perlu perbaikan dengan kata lain bisa lebih tinggi apabila sampai pada akhir periode Tahun 2025 semua berjalan lancar.

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 dibawah ini :

Tabel 3.3.4
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	79,2 (BB)	*B (63,72)	*80,45	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Sasaran kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu nilai hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Lunang, Komponen Perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi camat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Rician laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024 penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.3.5 dibawah ini :

Tabel 3.3.5**Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024**

No	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		Komposisi Yang dinilai	Nilai	
		Bobot	2023		Bobot	2024
A	Perencanaan Kinerja	30,00	26,66	Perencanaan Kinerja	30,00	19,99
B	Pengukuran Kinerja	30,00	20,55	Pengukuran Kinerja	30,00	17,02
C	Pelaporan Kinerja	15,00	11,52	Pelaporan Kinerja	15,00	11,02
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,13	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,70
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,30 (BB)	Nilai Hasil Evaluasi	100	63,72 (B)

Sumber : LHE AKIP Kecamatan Lunang Tahun 2023 dan 2024

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh pemerintah Kecamatan Lunang berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/852/INSP/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja tahun 2025, diuraikan hasil evaluasi AKIP Kecamatan Lunang sebagai Berikut :

a. Perencanaan Kinerja Dengan Nilai 19,99

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 19,99 dengan uraian sebagai berikut :

Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan telah memenuhi standar yang baik, dengan indikator kinerja yang dirumuskan secara SMART, telah diformalkan dan dipublikasikan, serta memperhatikan keterkaitan kinerja dengan bidang lain (crosscutting). Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Dokumen Renstra, IKU, dan Perjanjian Kinerja (PK) telah diformalkan secara lengkap (bernomor, bertanggal, serta dilengkapi tanda tangan dan stempel). Akan tetapi, dokumen Renja belum memenuhi syarat formal karena belum memiliki nomor, tanggal, tanda tangan, dan stempel.
2. Dokumen Renstra dan IKU belum dipublikasikan, yang dibuktikan dengan tidak adanya tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti unggah.
3. Dokumen Renstra belum menyajikan indikator tujuan.
4. Pemantauan Rencana Aksi secara periodik masih sebatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja, dan belum mencakup:

- a. Pemantauan perkembangan capaian target dalam rencana aksi secara berkala;
- b. Analisis terhadap setiap deviasi yang terjadi serta perumusan alternatif solusi sebagai langkah perbaikan bulanan;
- c. Mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui perkembangan (progress) kinerja terkini secara cepat dan akurat.

b. Pengukuran Kinerja dengan nilai 17,02

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 17,02 dengan uraian sebagai berikut :

Pengukuran kinerja telah berpedoman pada pedoman teknis yang berlaku, dengan menggunakan data yang andal serta memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi pendukung. Selain itu, pengukuran kinerja juga telah memperhatikan aspek efisiensi anggaran dalam pencapaian target kinerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi e-SAKIP saat ini baru digunakan sebagai sarana pengumpulan data kinerja (input data) dan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat pengukuran dan analisis capaian kinerja.
2. Camat belum terlibat secara optimal sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam proses pengukuran capaian kinerja, yang ditunjukkan dengan belum adanya notulen hasil monitoring pencapaian kinerja dan realisasi rencana aksi.
3. Rencana aksi telah dipantau secara berkala, namun data kinerja yang dikumpulkan belum secara jelas menggambarkan realisasi rencana aksi. Kondisi ini mengakibatkan masih terdapat target indikator kinerja yang tidak tercapai, sehingga capaian tahun 2024 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Belum terdapat pemantauan yang memadai terhadap pengukuran capaian kinerja. Hal ini disebabkan belum adanya laporan pemantauan atau notulen rapat yang menunjukkan bahwa setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang hingga tingkat staf, sehingga masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai.
5. Efisiensi penggunaan anggaran belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari masih adanya target kinerja yang tidak tercapai. Kondisi ini sebagaimana tergambar dalam laporan kinerja yang telah disusun.

6. Pengukuran kinerja belum dipahami secara merata oleh masing-masing individu, yang disebabkan belum dilaksanakannya pengukuran kinerja secara berkala dan terstruktur.

c. Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,02

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 11,02 dengan uraian sebagai berikut :

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan, dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan. Penyajiannya telah memenuhi standar dengan menggambarkan kualitas capaian kinerja, informasi mengenai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan.

Namun demikian, masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu Laporan Kinerja belum menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja yang membandingkan capaian pada level daerah dengan capaian pada level nasional. Meskipun tabel data telah tersedia, namun belum dilengkapi dengan analisis perbandingan yang memadai.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 15,70

Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 15,70 dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan SOP (karena belum menjangkau hingga tingkat staf). Hal ini memengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) berupa E-SAKIP dan E-Kinerja.
2. Pemantauan capaian kinerja internal belum didukung oleh SDM yang memadai (karena belum menjangkau hingga tingkat staf dan belum terdapat SK Tim Evaluasi Internal).

e. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Lunang, direkomendasikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

1. Semua Dokumen Perencanaan Kinerja harus memenuhi syarat diformalkan dilengkapi nomor, tanggal, tanda tangan dan stempel.
2. Semua Dokumen Perencanaan Kinerja harus dipublikasikan.
3. Renstra menyajikan indikator tujuan.
4. Pemantauan Rencana Aksi dilakukan secara periodik dengan menyajikan:
 - a) Capaian target dalam rencana aksi secara periodik dipantau kemajuannya;
 - b) Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, sehingga terdapat perbaikan tiap bulannya;
 - c) Mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru.

b. Pengukuran Kinerja

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip (<http://esakip.pesisirselatankab.go.id>) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
2. Camat terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, yang dibuktikan dengan adanya notulen hasil monitoring pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi.
3. Menelaah kembali penetapan target pada Perjanjian Kinerja, agar capaian kinerja tahun berikutnya dapat dicapai dengan mengatasi semua hambatan/kendala terhadap indikator kinerja yang telah diperjanjikan.
4. Rencana aksi dipantau secara berkala, dengan pengukuran kinerja yang dipantau sampai ke jenjang staf dengan memberikan solusi atau alternatif terhadap deviasi yang terjadi, sehingga capaian kinerja lebih optimal.

c. Pelaporan Kinerja

LKj menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Pemantauan capaian kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang dilaksanakan sesuai SOP (sampai ke jenjang staf) yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kinerja, serta penggunaan teknologi informasi (Aplikasi) berupa E-SAKIP dan E-Kinerja

2. Pemantauan capaian kinerja internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai (dipantau sampai ke jenjang staf dan ada SK Tim Evaluasi Internal).

f. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.6
Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran Indikator Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Nilai AKIP Kecamatan Lunang	Skala	79,2 (BB)	63,72 (B)	80,45 %	1.634.608.748	1.571.699.794	96,15%	-19,3%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya dan anggaran diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Realisasi Anggaran}\}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja}$$

$$96,15 \div 80,45 = 1,1953$$

$$1 - 1,1953 = -0,1953$$

$$-0,1953 \times 100\% = -19,53\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya anggaran sebesar -19,53%. Nilai efisiensi yang negatif menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Dengan demikian, secara matematis pelaksanaan anggaran pada indikator tersebut belum menunjukkan efisiensi optimal.

Faktor keberhasilan :

Meskipun hasil pengukuran menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belum optimal, capaian indikator kinerja tetap berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, termasuk penyelesaian konflik sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh respons cepat dalam penanganan setiap kejadian, koordinasi yang efektif antar unsur kecamatan dan pemerintah nagari, serta pendekatan preventif yang mampu menjaga stabilitas wilayah sepanjang tahun. Dengan demikian, secara substantif tujuan kinerja tercapai, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek pengelolaan sumber daya agar lebih efisien pada tahun berikutnya.

Faktor Kegagalan atau Faktor Penyebab Tidak Efisiennya Pelaksanaan Anggaran:

1. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya berbasis outcome
2. Penyusunan target masih berorientasi pada output kegiatan, sehingga hubungan langsung antara belanja dan dampak kinerja belum maksimal.
3. Target kinerja relatif tinggi dibandingkan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran yang tersedia.
4. Terdapat kegiatan yang menyerap anggaran cukup besar namun kontribusinya terhadap indikator kinerja utama tidak signifikan.
5. Efektivitas pelaksanaan kegiatan belum optimal, beberapa kegiatan terlaksana sesuai administrasi, namun belum sepenuhnya meningkatkan nilai capaian indikator secara substantif.
6. Kapasitas SDM dalam manajemen kinerja perlu ditingkatkan
7. Perubahan kebijakan, keterbatasan kewenangan kecamatan, dan faktor lingkungan eksternal turut mempengaruhi capaian kinerja.

Upaya Perbaikan :

1. Penyelarasan Perencanaan dan Anggaran : Melakukan reviu Perjanjian Kinerja dan memastikan seluruh kegiatan serta alokasi anggaran berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja utama.
2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkala : Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran secara triwulanan untuk mencegah deviasi yang signifikan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kinerja : Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan, pengukuran, dan evaluasi kinerja berbasis outcome.
4. Rasionalisasi dan Prioritisasi Kegiatan : Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan capaian kinerja.

6. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lunang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.571.699.794 atau 96,15% dari total anggaran sebesar Rp. 1.634.608.748 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 3,85%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

A. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terdiri dari indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan survey di kantor Camat Lunang selama periode Januari-Desember tahun 2025.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.7
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	87	90,16	103,63

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lunang mencapai 90,16 dari target 87,00 atau tingkat capaiannya mencapai 103,63%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil survey kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik pada unit penyelenggaraan layanan publik di lingkungan Kecamatan Luangng. Dimana tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan publik.

Gambar 3.1

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Pelayanan BPJS	67	88,06	90,67	97,39	91,04	90,67	88,06	91,42	90,67	87,31	90,59
2.	Surat Keterangan	63	86,9	88,49	94,44	92,86	87,30	84,52	94,05	86,11	84,92	88,84
3	Dispensasi Nikah	32	89,84	90,63	96,88	90,63	89,06	89,06	92,19	92,19	89,06	91,06
Rerata IKM Per Unsur			88,27	89,93	96,24	91,51	89,01	87,21	92,55	89,66	87,10	90,16
IKM Unit Layanan			90,16									
Mutu Unit Layanan			A									

Sumber : Laporan SKM Kecamatan Lunang Tahun 2025

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	80	82,80	103,50	85	85,45	100,53	87	90,16	103,63%

Sumber : Perencanaan dan Laporan tahun 2025

Dari tabel 3.3.8 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 103,63 %, tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 Capaian Indikator kinerja sebesar 103,53% dan tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja sebesar 103,50%. Pencapaian sasaran strategis ini, pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,10% dari tahun 2024; dengan kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.9
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satua	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Renstra	Realisasi Renstra	Capaian Renstra
			2024	2024	2024	2025	2025	2025
1	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	80	85,45	106,81	87	90,16	103,63%

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Target pada Perjanjian Kinerja lebih rendah dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra. Walaupun terjadi perubahan target capaian namun dapat dicapai dengan maksimal dan berjalan dengan lancar. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dilakukan survey oleh Kecamatan Lunang.

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Nasional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.10
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	87	90,16	103,63%	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor keberhasilan :

1. Pelayanan yang tepat waktu akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan kerja, sehingga tidak menimbulkan kebosanan Masyarakat ketika mengurus suatu surat perizinan. Bila pelayanan dapat berlangsung dengan tepat waktu maka kinerja Staf dapat dinilai baik oleh Camat maupun Masyarakat. Karena Staf telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
2. Koordinasi yang baik antara Pegawai Kantor Camat Lunang dalam melaksanakan kegiatan
3. Adanya pemanfaatan teknologi berupa *google form* dalam proses pengumpulan data survey
4. Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
5. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala berarti yang dapat menjadi permasalahan, namun di terlihat potensi dimana Masyarakat memiliki kecenderungan

untuk enggan mengisi kuesioner dikarenakan banyaknya poin-poin yang harus di isi dan dinilai.

Upaya Perbaikan :

Kedepannya, Kecamatan Lunang akan lebih mempermudah akses untuk masyarakat dalam pengisian kuesioner dengan lebih menyederhanakan pertanyaan dan isian form tanpa mengurangi esensi dari kuesioner itu sendiri; dan meningkatkan kualitas pelayanan lebih prima lagi kedepannya.

6. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.11
Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	87	90,16	103,63%	6.468.000	6.468.000	100,00%	3,51%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya dan anggaran diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Realisasi Anggaran}\}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{103,63} = 0,9649$$

$$1 - 0,9649 = 0,0351$$

$$0,0351 \times 100\% = 3,51\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya anggaran sebesar 3,51%. Artinya, capaian kinerja melampaui target dengan penggunaan anggaran sesuai pagu, sehingga menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang relatif efisien.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat,

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lunang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.468.000 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp. 6.468.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0%, karena seluruh pagu anggaran terealisasi sepenuhnya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Lunang.

A. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri dalam Negeri nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan system Inovasi daerah, dimana daerah dalam rangka peningkatan pemerintah daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia diperlukan penguatan system inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan. Berhubungan dengan dasar hukum diatas maka Kecamatan Lunang menetapkan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan. Inovasi Lunang Terpadu telah mencapai nilai kematangan sebesar 94, sedangkan target pada tahun 2025 adalah 75.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai Kematangan Inovasi Kec. Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.12
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian
Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	75	94	125,33%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Lunang mencapai 94 dari target 75 atau tingkat capaiannya mencapai 125,33%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu LUNANG TERPADU.

Capaian kinerja nyata Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan sebesar 94 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 125,33 % atau telah mencapai target (melebihi target).

Gambar 3.2
Inovasi Lunang Terpadu



Sumber : Banner Lunang Terpadu di Kecamatan Lunang

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena

kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	1 Inovasi	1 Inovasi	100	75	51	68,00	75	94	125,33

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Pada tahun 2023 terdapat perbedaan indikator kinerja dengan indikator kinerja tahun 2024 dan 2025. Dimana pada tahun 2025 terdapat penajaman indikator kinerja, yang sebelumnya adalah Jumlah Inovasi Kecamatan Lunang yang terlaksana menjadi lebih spesifik, yaitu Jumlah Nilai kematangan Inovasi

Dari tabel 3.3.13 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 125,33%, sementara pada tahun 2023 dan 2024 sebelumnya Capaian Indikator kinerja sebesar 100% , yaitu 1 buah inovasi terlaksana. Sehingga dapat dikatakan capaian indikator tersebut berpredikat **Sangat Baik**. Dan capaian kinerja tahun 2025 untuk indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Lunang berpredikan **Sangat Baik**.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.14 dibawah ini :

Tabel 3.3.14
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restru	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2025	2025	2025
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	75	51	68,00	75	94	125,33

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 125,33 % dengan capaian **Sangat Baik**.

Nlai kematangan inovasi Kecamatan Lunang didapatkan dari hasil penilaian pada website IGA, yang kemudian disampaikan dalam Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.10.30.1/4/Bapedalitbang/2026, berikut ini :

Gambar 3.3 : Surat Sekretariat Daerah



B. KECAMATAN						
1.	Kecamatan IV Jurai	LEGO MENARI (Lewat Gotong Royong Membangun Nagari)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	97.00	Terkirim	13.01-145017-2024
2.	Kecamatan Lunang	LUNANG TERPADU	Inovasi pelayanan publik	94.00	Terkirim	13.01-143001-2023
3.	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Giatkan Cabang Olahraga Jauhi Narkoba (GACOR)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	93.00	Terkirim	13.01-114318-2023
4.	Kecamatan Koto XI Tarusan	PENA SIASAT	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	93.00	Terkirim	13.01-114318-2023
5.	Kecamatan Batang Kapas	Colek (Cek mOnitoring Lihat	Inovasi pelayanan	92.00	Terkirim	13.01-144148-

Sumber : Lampiran Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.10.30.1/4/Bapedalitbang/2026, tanggal 6 Januari 2026 tentang Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- Adanya Sinergitas Internal dan Eksternal dalam Lingkup Pemerintah Kecamatan Lunang sehingga dapat merumuskan inovasi terbaru di Kecamatan
- Adanya forum-forum yang telah terbentuk sehingga memudahkan perumusan inovasi-inovasi kecamatan
- Adanya dukungan dari Stekholder Kecamatan dan juga Pimpinan Daerah (Bupati) untuk terus berinovasi di Kecamatan Lunang

Potensi Hambatan :

- Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung dalam penerapan Inovasi yang telah dibuat.
- Belum adanya buku panduan inovasi yang merupakan sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Lunang

Upaya Perbaikan :

- Melakukan Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait Lunang Terpadu.
- Perlunya Penyusunan data dan informasi terkait Inovasi sebagai sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Lunang

6. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.15
Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran Indikator
Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	75	94	125,33	6.468.000	6.468.000	100,00	20,20%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya dan anggaran diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Realisasi Anggaran}\}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$100/125,33=0,798$$

$$1-0,798=0,202$$

$$0,202 \times 100\% = 20,20\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya anggaran sebesar 20,20%. Artinya, dengan penggunaan anggaran 100%, kinerja mampu melampaui target hingga 125,33%, sehingga menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang sangat efisien.

8. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat,

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kec. Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.468.000 atau 100% dari

total anggaran sebesar Rp. 6.468.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0%, karena seluruh pagu anggaran terealisasi sepenuhnya.

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Nagari

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Nagari terdiri atas dari 3 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
2. Angka Kemiskinan Ekstrim
3. Prevalensi Stunting (Eppgbm)

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.16

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025

No	Sasaran	IndikatorKinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	100%	100%	100
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	100
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	5%	4,80%	104,17
Rata-ratacapaian(%)						101,39

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. **Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik**, mencapai 100% dari target 100% atau tingkat capaiannya mencapai 100%.

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APB Nagari. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Nagari selain didanai oleh APB Nagari, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

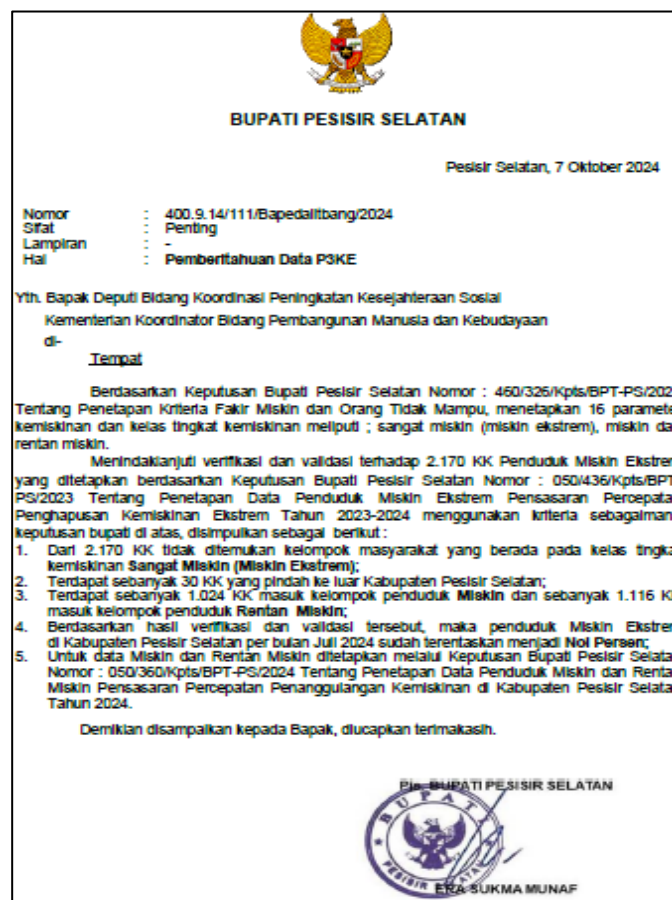
Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui

pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari.

- 2. Realisasi capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim**, mencapai 0% dari target 0% atau tingkat capaiannya mencapai 100%. Angka Kemiskinan Ekstrim merupakan penilaian terhadap Hasil verifikasi dan validasi terhadap 2.170 KK Penduduk Miskin Ekstrem yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/436/Kpts/BPT- PS/2023 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024.

Untuk data Miskin dan Rentan Miskin ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/360/Kpts/BPT-PS/2024 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Gambar 3.4 Surat Bupati Terkait Kemiskinan Ekstrim



Gambar : SK Bupati Pemberitahuan Data P3KE 2024

3. Realisasi capaian indikator Prevalensi Stunting (Eppgbm) mencapai, 4,80% dari target 5% atau tingkat capaiannya mencapai 104,17%.

Prevalensi Stunting merupakan persentase dari jumlah balita stunting dibagi dengan jumlah balita diukur dikali 100, data stunting ini didapatkan dari Rekap Data E-PPGBM Puskesmas Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang telah di setujui dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang berada pada nomor urut 2, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 3.5 Lampiran Rekap Data Stunting Pesisir Selatan Tahun 2025

REKAPAN DATA E-PPGBM (D/S) DAN BALITA STUNTING BULAN AGUSTUS TAHUN 2025
Data Tanggal: 2025-08-04 10:17:09

No	Puskesmas	Sasaran Real	Jumlah Balita Diaring	% DS	BBI					TBU					BUT					Stunting	%	Masing	%	Undangan	%	Dinas	%		
					Sangat Kurang	Kurang	Berisi Balita Normal	Risiko Lebih	Outlier	Sangat Penced	Preced	Normal	Taggal	Outlier	Gil Baru	Gil Kurang	Normal	Risiko Gil Lebih	Gil Lebih									Obesitas	Outlier
1	TANJUNG MAKMUR	1.280	1.257	99,76	15	64	1.117	54	7	16	41	1.193	-	7	2	29	1.052	117	34	15	8	57	4,5	31	2,5	79	6,3	49	3,9
2	TANJUNG BERINGIN	1.495	1.495	99,66	14	70	1.308	82	11	16	55	1.395	6	13	18	48	1.102	231	60	11	15	71	4,8	66	4,4	84	5,7	71	4,8
3	TAPAN	1.439	1.439	99,11	22	49	1.301	17	3	13	47	1.074	1	-	1	27	814	60	6	3	3	46	4,4	34	4,3	74	4,4	6	0,1
4	BAHUL	1.263	1.242	98,34	3	11	1.207	10	11	1	26	1.205	4	6	3	2	1.217	6	2	-	12	27	2,2	5	0,4	14	1,1	2	0,2
5	INDRAPURA	1.720	1.699	98,78	9	50	1.565	68	7	6	47	1.515	23	8	11	49	1.541	78	9	2	9	53	3,1	60	3,5	59	3,5	11	0,6
6	PUSKESMAS AIRPURA	1.542	1.542	100,00	19	118	1.356	45	4	19	34	1.486	1	2	2	54	1.244	193	33	10	6	53	3,4	56	3,6	117	8,0	43	2,8
7	AIR HAJI	3.321	3.266	98,34	41	251	2.901	49	24	76	186	2.975	7	22	30	131	2.921	145	23	10	28	262	8,0	141	4,3	292	8,9	33	1,0
8	BALAU SELASA	1.759	1.734	98,58	16	89	1.578	39	12	14	66	1.628	15	11	14	95	1.521	76	8	3	17	80	4,6	109	6,3	105	6,1	11	0,6
9	KAMBANG	2.351	2.322	98,77	30	150	2.040	87	15	34	146	2.115	20	17	27	100	1.975	147	42	11	20	170	7,3	127	5,5	180	7,8	53	2,3
10	KOTO BARU	1.169	1.169	100,00	7	52	1.081	29	-	13	16	1.135	5	-	5	44	1.038	67	13	2	-	29	2,5	49	4,2	59	5,0	15	1,3
11	SURANTIN	2.746	2.742	99,85	30	235	2.430	64	3	61	172	2.519	10	-	9	146	2.422	128	24	10	3	218	7,8	155	5,7	255	9,3	34	1,2
12	KAHU GADANG	1.327	1.321	99,55	15	106	1.117	76	7	21	107	1.176	9	8	23	80	1.058	102	17	13	8	128	9,7	103	7,8	121	9,2	50	3,8
13	PASAR KUDUK	1.440	1.409	97,85	11	117	1.238	40	3	26	73	1.305	5	-	4	103	1.140	121	29	9	3	99	7,0	107	7,6	118	9,1	38	2,7
14	IV KOTO MUDIK	665	665	100,00	17	80	552	16	-	13	48	584	-	-	4	35	560	91	9	5	1	81	12,2	38	5,9	97	14,6	14	2,1
15	SAUDO	2.171	2.165	99,72	21	83	2.033	26	2	21	67	2.079	-	2	13	63	1.974	93	17	3	2	88	4,1	76	3,5	104	4,8	20	0,9
16	LUMPO	813	812	99,88	10	72	708	18	4	10	67	731	-	4	3	42	698	44	14	7	4	77	9,5	45	5,5	82	10,1	21	2,6
17	KOTO BERAPAK	1.149	1.055	91,82	21	109	884	38	3	28	78	991	3	3	6	69	898	59	14	6	3	56	5,3	75	7,1	130	12,3	20	1,9
18	PASAR BARU	1.510	1.389	91,99	12	145	1.163	53	10	26	53	1.209	12	5	11	112	1.140	79	21	9	17	79	5,7	123	8,8	157	11,3	30	2,2
19	ASAM KUMBANG	480	477	99,38	3	26	435	13	-	6	26	443	1	1	3	24	427	21	5	1	1	32	6,7	27	5,7	29	6,1	6	1,3
20	TASILAN	2.287	2.276	99,52	51	250	1.850	85	-	39	219	2.005	12	-	21	132	1.898	163	53	10	-	258	11,3	153	6,7	141	15,0	62	2,7
21	BARUNG-BARUNG BELANTU	1.424	1.422	99,86	16	94	1.276	34	4	30	96	1.388	4	4	7	68	1.208	111	20	3	5	126	8,8	75	5,3	108	7,6	23	1,6
	JUMLAH	33.129	32.677	98,64	376	2.345	28.990	938	134	481	1.634	30.531	133	113	208	1.435	18.165	2.091	472	140	184	2.095	14,8	118	8	2.635	8,0	612	1,9

Di Sertu Cah,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan
Agustin Bahmadan, S.ST MM
NP. 1919603120212 2 556

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Pesisir Selatan
Ag. FITRIA, S. Farmi
NP. 1919603120212 2 009

Panis, Agustus 2025
Penjabat Kepala Layanan Kesehatan
Merli Susanto
NP.1919603120212 2 008

Gambar : Rekap Data E-PPGBM Puskesmas Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	10 Nagari	75%	100%	70%	100%	100%	10 Nagari	133,33 %	100%
2.	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	100%	100%
3.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	-	2,51%	5,00%	-	3,91%	4,80	-	64,19%	104,17

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Target pada indikator Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, pada tahun 2023 mengalami penajaman indikator kinerja, pada tahun 2023 indikator kinerja nya adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari dengan target sebanyak 10 Nagari dengan pengelolaan keuangan nagari yang baik. Tahun 2024, target meningkat menjadi 75%, dan realisasi berhasil mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 133,33% (melampaui target). Pada tahun 2025, target kembali ditingkatkan menjadi 100%. Realisasi tahun 2025 telah mencapai 100%, dengan capaian kinerja 100%, yang berarti seluruh nagari telah memiliki administrasi yang baik sesuai target yang ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan, Terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke 2024, dan pada tahun 2025 kinerja tetap optimal dengan capaian penuh sesuai target.
2. Target pada indikator Angka Kemiskinan Ekstrim, pada tahun 2023 belum muncul kemudian pada Tahun 2024 mengalami penajaman indikator kinerja, sehingga muncullah indikator Angka kemiskinan ekstrim dengan target sebesar 0%. Tahun 2024 ditetapkan target 0%, dan realisasi juga mencapai 0%, dengan capaian kinerja 100%. Tahun 2025, target tetap 0%, dan realisasi kembali 0%, sehingga capaian kinerja tetap 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa : Kinerja pengentasan kemiskinan ekstrem sangat baik karena berhasil mempertahankan angka 0% selama dua tahun berturut-turut (2024 dan 2025).

3. Target pada indikator Prevalensi Stunting, pada tahun 2023 belum muncul kemudian pada Tahun 2024 mengalami penajaman indikator kinerja, sehingga muncullah indikator Angka kemiskinan ekstrim dengan target sebesar 2,51%. Tahun 2024, target ditetapkan sebesar 2,51%, dengan realisasi sebesar 3,91%, sehingga capaian kinerja tercatat 64,19% (belum mencapai target). Pada tahun 2025, target menjadi 5,00%, dengan realisasi sebesar 4,80%, sehingga capaian kinerja mencapai 104,17% (melampaui target). Sehingga dapat disimpulkan, Tahun 2024 capaian belum optimal karena realisasi masih di atas target. Namun pada tahun 2025 terjadi perbaikan signifikan, di mana realisasi berada di bawah batas target sehingga kinerja dinilai melampaui target yang ditetapkan.

3. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.18

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	100%	100%	100	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
2.	Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	100	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
3.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	4,80%	5%	104,17	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.19
Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100%	100%	100	- Tersedianya data digital di pemerintahan Nagari. - Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Nagari	- Meningkatkan SDM Pemerintah Nagari - Mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan Nagari
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	0%	100	- Kurangnya Akses Terhadap Pelayanan Dasar. - Belum maksimal Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.	- Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar. - Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	Persen	5%	4,89%	104,17	- Kurangnya Akses ke Nutrisi yang Cukup dan Seimbang - Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran tentang Gizi - Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan - Masalah Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	- Meningkatkan Akses dan Kualitas Gizi - Pendidikan Gizi dan Kesadaran Masyarakat - Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak - Perbaikan Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.20

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	100%	100%	100	28.681.500	20.433.500	71,24	63,1%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	100				
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5%	4,89%	104,17				

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya dan anggaran diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Realisasi Anggaran}\}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja

$$\text{Rata-rata Realisasi} = (100+100+104,17)/3 = 101,39\%$$

$$\text{Rata-rata Target} = (100 + 0 + 5)/3 = 52,5 \%$$

$$\text{Realisasi Anggaran/Rata-rata Realisasi Kinerja} = 20.433.500/101,39 = 201.533,28$$

$$\text{Jumlah Anggaran/Rata-rata Target Kinerja} = 28.681.500/52,5 = 546.314,29$$

$$201.533,28/546.314,29 = 0,369$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - 0,369 = 63,1\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya pada sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari dengan

3 indikatornya adalah sebesar 63,1%. Ini menunjukkan bahwa, program tergolong Efisien, Output tercapai >100% dan nggaran terserap hanya 71,24%. Sehingga menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang sangat efisien.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari dengan 3 indikatornya Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 20.433.500 atau 71,24% dari total anggaran sebesar Rp. 28.681.500, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar efisiensi anggaran sebesar Rp 8.248.000 atau 28,76%.

Sasaran 5 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari jumlah Konflik yang Tertangani dibagi Jumlah Konflik yang terjadi dikali 100%. Jumlah Konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kecamatan Lunang yang di analisa bisa menimbulkan Potensi Konflik di Kecamatan Lunang.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Lunang

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Persentase Konflik yang diselesaikan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.21
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	100	100	100%

Dari Tabel di atas dapat dilihat Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Lunang Tahun 2025 diperoleh dari jumlah konflik yang dilaporkan dan jumlah konflik yang berhasil diselesaikan. Perhitungan Realisasi Persentase Konflik yang diselesaikan, didapatkan melalui rumus pada IKU yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100$$

Pada Tahun 2025 tidak terdapat konflik besar yang menggonjang keamanan dan stabilitas di kecamatan Lunang, sehingga persentase konflik yang diselesaikan adalah 100% dengan capaian kinerja 100%.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Persentase Konflik yang diselesaikan terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.22
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Konflik yang diselesaikan dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2025	2025	2025
1	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	100	125%	100%	100%	100%

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.23

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	-	80%	100%	-	100%	100%		125%	100%

Pada tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja persentase konflik yang diselesaikan, sehingga target, realisasi dan capaiannya tidak tersedia, kemudian pada tahun 2024 dan 2025 terdapat penajaman indikator kinerja menjadi lebih spesifik, maka muncullah indikator kinerja persentase konflik yang diselesaikan.


Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Persentase Konflik yang diselesaikan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 100% dengan capaian **Sangat Baik**.

Gambar 3.6 Laoran Penyelesaian Konflik

LAPORAN PENYELESAIAN KONFLIK



**SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN LUNANG
TAHUN 2025**



Tujuan kegiatan:

- Mengantisipasi potensi konflik menjelang tahapan Pilwara.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor.
- Membangun komitmen bersama menjaga stabilitas wilayah.

Hasil kegiatan:

- Terjalin koordinasi aktif antar unsur terkait.
- Tidak terjadi konflik selama tahapan persiapan Pilwara Tahun 2025.
- Situasi keamanan tetap terkendali.

3.2 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

Indikator: Persentase Konflik yang Diselesaikan

Rumus:

$$\text{Jumlah konflik yang diselesaikan} \div \text{Total jumlah konflik} \times 100\%$$

Data Tahun 2025:

Total jumlah konflik : 0 kasus
 Jumlah konflik yang diselesaikan : 0 kasus

Sumber : Laporan Tahunan Penyelesaian Konflik di Kecamatan Lunang Tahun 2025

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.24
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
Persentase Konflik yang diselesaikan	%	100%	100	100%	-	-	-

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor keberhasilan :

- Adanya dukungan dari Pimpinan dan Stakeholder terkait
- Kompetensi SDM ASN Kantor Camat Lunang yang baik di pekerjaan Lapangan

Faktor Kegagalan :

- Masih banyaknya konflik yang berada pada wewenang Kecamatan Lunang, yang terjadi di Masyarakat namun tidak dilaporkan ke Pemerintahan Kecamatan

Upaya Perbaikan :

Kedepannya, Kecamatan Lunang akan berusaha mengeratkan hubungan dengan organisasi maupun perkumpulan yang ada di masyarakat. Menjalin komunikasi yang aktif dengan Aparatur keamanan di Kecamatan Lunang.

6. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.25
Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Anggaran Indikator
Persentase Konflik yang Diselesaikan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Konflik yang diselesaikan	%	100%	100	100%	39.127.000	36.710.000	93,82	6,18%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya dan anggaran diperoleh dari rumus sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi = $1 - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} & \frac{93,82}{100} = 0,9382 \\ & 1 - 0,9382 = 0,0618 \\ & 0,0618 \times 100\% = 6,18\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya anggaran sebesar 6,18%. Artinya, target kinerja tercapai 100% dengan penggunaan anggaran hanya 93,82%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 6,18%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan terdiri dari :

I. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Presentase Konflik yang Diselesaikan di Kecamatan Lunang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 36.710.000 atau 93,82% dari total anggaran sebesar Rp. 39.127.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 2.417.000 atau 6,18%.

3.4. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Lunang kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, DPA Perubahan Kecamatan Lunang kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.708.885.248.- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.635.311.294,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,69%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Lunang kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.26
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BELANJA (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.634.608.748	1.571.699.794	96,15%
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00%
	1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00%
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.297.787.085	1.243.813.378	95,84%
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.243.622.085	1.189.648.378	95,66%
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.165.000	54.165.000	100,00%
	3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.243.432	197.912.080	97,38%
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.761.504	1.755.000	99,63%
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.967.440	29.732.000	90,19%
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.906.850	20.903.000	99,98%
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan	6.313.300	6.313.300	100,00%
	5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.294.338	139.208.780	98,52%
	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	61.260.000	58.157.036	94,93%
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	9.526.148	75,60%
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.660.000	48.630.888	99,94%
	5 Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	72.318.231	71.817.300	99,31%
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.710.231	28.460.300	99,13%
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.400.000	7.400.000	100,00%
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.208.000	35.957.000	99,31%

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		BELANJA (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		28.681.500	20.433.500	71,24%
	1	<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	28.681.500	20.433.500	71,24%
	1.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.150.000	5.150.000	100,00%
	2.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.531.500	15.283.500	64,95%
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		39.127.000	36.710.000	93,82%
	1	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	39.127.000	36.710.000	93,82%
	1.	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	34.590.000	33.590.000	97,11%
	2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.537.000	3.120.000	68,77%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.468.000	6.468.000	100,00%
	1	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	6.468.000	6.468.000	100,00%
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.468.000	6.468.000	100,00%
JUMLAH			1.708.885.248	1.635.311.294	95,69%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel capaian indikator kinerja, secara umum dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program kegiatan telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian yang sangat optimal.

Rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 101,94%, yang berarti secara agregat realisasi kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan di Kecamatan Lunang telah dilaksanakan secara efektif dan terukur.

Pada sasaran terwujudnya pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan berkinerja, nilai AKIP Perangkat Daerah memperoleh realisasi sebesar 63,72 (kategori B) dengan capaian 80,45%. Meskipun belum mencapai target kategori BB (79,2), capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang baik dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penguatan akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Dalam sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi sebesar 90,16 dari target 87 atau dengan capaian 103,63%. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Lunang.

Pada sasaran peningkatan kualitas inovasi daerah, nilai kematangan inovasi kecamatan terealisasi sebesar 94 dari target 75 dengan capaian 125,33%. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan inovasi serta kemampuan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Sasaran peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase nagari yang memiliki administrasi baik dan angka kemiskinan ekstrem mencapai target 100%, sedangkan prevalensi stunting (EPPGM) berhasil ditekan menjadi 4,80% dari target 5,00% dengan capaian 104,17%. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor serta dukungan terhadap pembangunan sosial masyarakat.

Selanjutnya, pada sasaran peningkatan ketentraman dan stabilitas kecamatan, persentase konflik yang diselesaikan mencapai 100%, sesuai dengan target yang

ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan masyarakat berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik. Meskipun terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, capaian rata-rata yang melampaui 100% menunjukkan bahwa kinerja organisasi berada pada jalur yang tepat.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang belum maksimal dan untuk mempertahankan realisasi yang telah mencapai target, maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- 1) Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik agar sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.
- 2) Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Lunang, sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi internal Kantor Camat Lunang yang melibatkan seluruh Pegawai, baik ASN maupun Non ASN di secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
- 4) Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, pemerintahan Nagari, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program kerja Kecamatan Lunang.
- 5) Menjadikan kendala dan masalah yang di hadapi pada tahun 2025 untuk dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun – tahun berikutnya.


CAMAT LUNANG,
Daniel Agustian, S.ST., M.CIO.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19830816 200502 1 001

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUNARDI, S.Pd. M.TPd**
Jabatan : Camat Lunang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN**



(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

**PIHAK PERTAMA
CAMAT LUNANG**



(SUNARDI, S.Pd. M.TPd)
NIP. 19751128 200604 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	87
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	- Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100%
		- Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
		- Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,00%
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 22.500.000,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 33.860.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 40.940.000,-	APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.736.889.154	APBD
	J U M L A H	Rp. 1.834.189.154	APBD

Painan, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN**



(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

**PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG**



(SUNYARDI S.Pd, M.TPd)

751128 200604 1 005



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMWIL, SSTP, M.M.
Jabatan : Plt. Camat Lunang
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. HENDRAJONI, S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2025


PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN

(H. HENDRAJONI, SH., MH.)


PIHAK PERTAMA
PLT. CAMAT LUNANG

(SYAMWIL, SSTP, M.M.)
NIP. 19820113 200112 1 003

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	87
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	- Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100%
		- Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
		- Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,00%
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.468.000,-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 28.681.500,-	-
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 39.127.000,-	-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.634.608.748,-	-
JUMLAH		Rp. 1.708.885.248,-	-

Painan, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN

(H. HENDRAJONI, SH., MH.)

PIHAK PERTAMA
Pt. CAMAT LUNANG

(SYAMWIL, SSTP, M.M.)
NIP. 19820113 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

Jl. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://lunangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el lunangcamat22@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LUNANG NOMOR : 000.9.6.3/20.1/CL/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lunang Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lunang sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Lunang;
 - b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Lunang;
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Lunang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang

Pada tanggal : 23 Januari 2025



Lunang, 23 Januari 2025

CAMAT LUNANG,
KABUPATEN PESIR SELATAN

SUNARDI, S.Pd. M.TPd.

NIP. 19751128 200604 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KAB. PESISIR SELATAN
 NOMOR : 000.9.6.3/20.1/CL/2025
 TANGGAL : 23 Januari 2025
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN LUNANG
 TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Formulasi	Sumber Data	PJ Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel & Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Inspektorat	Sekcam, Kasubbag PKP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	87	<u>Jumah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</u> Total Responden Kuesioner Survey	Kantor Camat Lunang	Kasi Pelayanan, Kasubbag Umum
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75	Nilai Kematangan Inovasi dari BSKDN Kemendagri	Bappeda	Kasi Pelayanan, Kasubbag PKP
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	- Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100%	<u>Jumlah Nagari dengan Realisasi Anggaran Baik</u> Total Jumlah Nagari	Pemerintahan Nagari	Kasi Pemerintahan, Kasi Ekobang
		- Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	<u>Jumlah Penduduk dibawah garis Kemiskinan Ekstrem</u> Total Jumlah Penduduk	Dinas Sosial PPrPA	Kasi Kesos
		- Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,00%	<u>Jumlah Stunting pada Balita</u> Total Jumlah Balita	Puskesmas, Dinas Kesehatan	Kasi Kesos
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100%	<u>Jumlah Konflik yang diselesaikan</u> Total Jumlah Konflik yang dilaporkan	Kantor Camat Lunang	Kasi Trantib



Lunang, 23 Januari 2025
 CAMAT LUNANG,

SUNARDI S.Pd. M.TPd.
 NIP. 19751128200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

Jl. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://lunangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el lunangcamat22@gmail.com

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Agar seluruh *stakeholder* Kecamatan Lunang memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Kecamatan Lunang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah Kab. Pessel
Penanggung jawab	:	Sekcam dan Kasubbag PKP Kecamatan Lunang

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Total Responden Kuesioner Survey}} \times 100$
Sumber data	:	Kuesioner IKM oleh Kantor Camat Lunang
Penanggung jawab	:	Kasi Pelayanan dan Kasubbag Umum & Kepegawaian Kecamatan Lunang

3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Nilai Kematangan Inovasi dari BSKDN Kemendagri
Sumber data	:	Hasil Penilaian dari BSKN Kemendagri yang disampaikan oleh Bappeda Kab. Pessel
Penanggung jawab	:	Kasi Pelayanan dan Kasubbag PKP Kecamatan Lunang

4. Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi dan Kinerja Baik

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik, yaitu Realisasi Anggarannya $\geq 80\%$
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Nagari dengan Realisasi Anggaran Baik}}{\text{Total Jumlah Nagari}} \times 100$
Sumber data	:	Laporan Realiasi Anggaran dari Pemerintahan Nagari Se-Kecamatan Lunang
Penanggung jawab	:	Kasi Pemerintahan dan Kasi PMP Kecamatan Lunang

5. Prevalensi Stunting (EPPGBM)

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Merupakan persentase Balita penderita stunting di Kecamatan Lunang
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Stunting pada Balita}}{\text{Total Jumlah Balita}} \times 100$$
- Sumber data : Rekap Data Prevalensi Stunting oleh Puskesmas Kec. Lunang dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Pessel
- Penanggung jawab : Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lunang

6. Persentase konflik yang diselesaikan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Merupakan persentase konflik yang dapat diselesaikan
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Total Jumlah Konflik yang dilaporkan}} \times 100$$
- Sumber data : Laporan Kegiatan Penyelesaian Konflik oleh Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Lunang
- Penanggung jawab : Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lunang



Lunang, 23 Januari 2025
CAMAT LUNANG,


SUNARDI, S.Pd. M.TPd.

NIP. 19751128 200604 1 005

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESIR SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2025)	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (79,2)	*B (63,72)	80,45%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.634.608.748	Rp 1.571.699.794	96,15%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	90	103,45%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 6.468.000	Rp 6.468.000	100,00%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	94	125,33%				
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	- Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	100%	100%	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 28.681.500	Rp 20.433.500	71,24%
		- Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	100%				
		- Prevalensi Stunting (EPPGM)	5,00%	5,27%	94,88%				
5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik yang Diselesaikan	100%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 39.127.000	Rp 36.710.000	93,82%
TOTAL					100,59%		Rp 1.708.885.248	Rp 1.635.311.294	95,69%

Keterangan :

* AKIP Tahun 2024



Lunang, 10 Januari 2026
Pkt. Camat Lunang

SYAMWIL, SSTP, M.M
NIP. 198201132001121003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

APBD PERUBAHAN Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Desember

1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan						Sisa Anggaran Nilai (Rp.)
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Target	Realisasi		Deviasi	Target		Realisasi			Deviasi	
					%	%	% Capaian		Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%	% Capaian		
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11	16=5-12	
1	-	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,468,000	100	95	95	-5	0	0	6,468,000	100	INF	100	0
1.1	-	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6,468,000	100	95	95	-5	0	0	6,468,000	100	INF	100	0
1.1.1	APBD PERUBAHAN	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6,468,000	100	95	95	-5	0	0	6,468,000	100	INF	100	0
2	-	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28,681,500	0	75.52	INF	75.52	19,560,000	68.2	20,433,500	71.24	104.47	3.05	8,248,000
2.1	-	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28,681,500	0	75.52	INF	75.52	19,560,000	68.2	20,433,500	71.24	104.47	3.05	8,248,000
2.1.1	APBD PERUBAHAN	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,150,000	0	95	INF	95	5,150,000	100	5,150,000	100	100	0	0
2.1.2	APBD PERUBAHAN	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,531,500	0	71.26	INF	71.26	14,410,000	61.24	15,283,500	64.95	106.06	3.71	8,248,000
2.2	-	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0	0	NAN	0	0	0	0	0	NAN	0	0
2.2.1	APBD PERUBAHAN	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39,127,000	0	85.87	INF	85.87	40,940,000	104.63	36,710,000	93.82	89.67	-10.81	2,417,000
3.1	-	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39,127,000	0	85.87	INF	85.87	40,940,000	104.63	36,710,000	93.82	89.67	-10.81	2,417,000
3.1.1	APBD PERUBAHAN	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	34,590,000	0	95	INF	95	34,590,000	100	33,590,000	97.11	97.11	-2.89	1,000,000
3.1.2	APBD PERUBAHAN	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4,537,000	0	16.25	INF	16.25	6,350,000	139.96	3,120,000	68.77	49.14	-71.19	1,417,000
4	-	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,634,608,748	86	92.53	107.58	6.52	469,269,115	28.71	1,571,699,794	96.15	334.93	67.44	62,908,954
4.1	-	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	NAN	0	0	0	0	0	NAN	0	0
4.1.1	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	-	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,297,787,085	95.83	94.92	99.06	-0.9	43,680,000	3.37	1,243,813,378	95.84	2847.56	92.48	53,973,707
4.2.1	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,243,622,085	100	95.66	95.66	-4.34	0	0	1,189,648,378	95.66	INF	95.66	53,973,707
4.2.2	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54,165,000	0	77.97	INF	77.97	43,680,000	80.64	54,165,000	100	124	19.36	0
4.3	-	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203,243,432	79.81	91.09	114.14	11.29	303,181,115	149.17	197,912,080	97.38	65.28	-51.79	5,331,352
4.3.1	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,761,504	0	38.76	INF	38.76	0	0	1,755,000	99.63	INF	99.63	6,504

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

APBD PERUBAHAN Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Desember

1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan						Sisa Anggaran Nilai (Rp.)
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Target	Realisasi		Deviasi	Target		Realisasi			Deviasi	
					%	%	% Capaian		8=(7/6)*100	9=7-6	Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)		
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11	16=5-12	
4.3.2	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,967,440	0	88.5	INF	88.5	32,967,440	100	29,732,000	90.19	90.19	-9.81	3,235,440
4.3.3	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,906,850	100	95	95	-5	0	0	20,903,000	99.98	INF	99.98	3,850
4.3.4	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,313,300	0	94.97	INF	94.97	0	0	6,313,300	100	INF	100	0
4.3.5	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.6	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.7	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141,294,338	100	91.6	91.6	-8.4	270,213,675	191.24	139,208,780	98.52	51.52	-92.72	2,085,558
4.4	-	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61,260,000	0	78.75	INF	78.75	50,100,000	81.78	58,157,036	94.93	116.08	13.15	3,102,964
4.4.1	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,600,000	0	94.99	INF	94.99	0	0	9,526,148	75.6	INF	75.6	3,073,852
4.4.2	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,660,000	0	74.55	INF	74.55	50,100,000	102.96	48,630,888	99.94	97.07	-3.02	29,112
4.5	-	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72,318,231	0	65.22	INF	65.22	72,308,000	99.99	71,817,300	99.31	99.32	-0.68	500,931
4.5.1	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28,710,231	0	64.44	INF	64.44	38,700,000	134.8	28,460,300	99.13	73.54	-35.67	249,931
4.5.2	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,400,000	0	44.99	INF	44.99	7,400,000	100	7,400,000	100	100	0	0
4.5.3	APBD PERUBAHAN	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,208,000	0	69.98	INF	69.98	26,208,000	72.38	35,957,000	99.31	137.2	26.93	251,000
Total				1,708,885,248	400	1303.92	--	--	529,769,115	1183.22	1,635,311,294	1588.79	--	--	73,573,954
Pencapaian Belum di synchronize Terakhir synchronize pada 2026-01-09 02:03:29				-	82.64	92.1	111.44	9.45	31		95.69		308.68	64.69	-

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

APBD PERUBAHAN Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Desember

Statistika Data						
Keterangan	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	1	0	2	0	3
Deviasi Antara 5% sampai 10%	1	0	4	0	1	1
Deviasi Dibawah -5%	0	0	0	3	7	8
Melebihi Target	3	3	5	4	13	9
Total Data		4		9		21
Keterangan : Ttb : Tertimbang PT : Pagu Total						



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: https://inspektoratpessel@yahoo.co.id

NOTA DINAS

Untuk : Yth. Bupati Pesisir Selatan
Dari : Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 700.1.2.1/ 855 /INSP/2025
Tanggal : 21 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, maka Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 terhadap seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR dan TGL LHE	NILAI	PREDIKAT
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	700.1.2.1/812/INSP/2025 21 Maret 2025	90,43	AA
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	700.1.2.1/824/INSP/2025 21 Maret 2025	89,54	A
3	Dinas Pertanian	700.1.2.1/827/INSP/2025 21 Maret 2025	89,50	A
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	700.1.2.1/826/INSP/2025 21 Maret 2025	88,91	A

26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	700.1.2.1/822/INSP/2025 21 Maret 2025	75,91	BB
27	Kecamatan Pancung Soal	700.1.2.1/841/INSP/2025 21 Maret 2025	75,60	BB
28	Kecamatan Lengayang	700.1.2.1/830/INSP/2025 21 Maret 2025	74,04	BB
29	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	700.1.2.1/818/INSP/2025 21 Maret 2025	70,68	BB
30	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	700.1.2.1/832/INSP/2025 21 Maret 2025	70,12	BB
31	Kecamatan IV Jurai	700.1.2.1/849/INSP/2025 21 Maret 2025	69,50	B
32	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	700.1.2.1/821/INSP/2025 21 Maret 2025	69,37	B
33	Kecamatan Koto XI Tarusan	700.1.2.1/840/INSP/2025 21 Maret 2025	68,06	B
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	700.1.2.1/820/INSP/2025 21 Maret 2025	67,96	B
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700.1.2.1/843/INSP/2025 21 Maret 2025	67,67	B
36	Kecamatan Airpura	700.1.2.1/851/INSP/2025 21 Maret 2025	66,54	B
37	Kecamatan Lunang	700.1.2.1/852/INSP/2025 21 Maret 2025	63,72	B
38	Kecamatan Bayang	700.1.2.1/820/INSP/2025 21 Maret 2025	62,00	B
39	Kecamatan Sutera	700.1.2.1/850/INSP/2025 21 Maret 2025	54,01	CC
40	Kecamatan Ranah Pesisir	700.1.2.1/831/INSP/2025 21 Maret 2025	52,35	CC
41	Kecamatan Batang Kapas	700.1.2.1/819/INSP/2025 21 Maret 2025	51,71	CC

2. Penilaian atas 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui beberapa dokumen antara lain dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen AKIP itu sendiri, didapati hal-hal yang masih merupakan kelemahan dari beberapa Perangkat Daerah. Penilaian komponen dasar ini dapat disimpulkan:



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H.Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611

Telepon : (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293

Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el setda@pesisirselatankab.go.id

Pesisir Selatan, 6 Januari 2026

Nomor : 500.10.30.1/4/Bapedalitbang/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025**

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zein Painan
3. Direktur RSUD Pratama Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas
se Kabupaten Pesisir Selatan

di
Tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **56,75** dengan Predikat **KABUPATEN INOVATIF**. Berdasarkan hal tersebut, dapat diinformasikan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melaporkan inovasi sebanyak 95 Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas. Selanjutnya, inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui *Innovative Government Award (IGA)* adalah sebanyak 32 Inovasi (rincian terlampir).

Berkenaan dengan hal di atas, hasil pelaporan Inovasi Daerah tahun 2025 agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas sesuai dengan **Perjanjian Kinerja**.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN, SKM, M.KES

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil Validasi	Nomor Registrasi (Kemendagri)
1.	2.	3.	4	5	6	7.
					Inovasi	
24.	Sekretariat DPRD	SIPINTAR (SISTEM PENGELOLAAN INTEGRASI ARSIP DIGITAL)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	55.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
		SIRAWAN (Sistem Informasi Rapat Dewan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	0	Inovasi dalam tahap inisiatif	-
25.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SATPOL PP GOES TO SCHOOL	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	40.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
26.	Inspektorat Daerah	Aplikasi TLHP APIP (Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Inovasi pelayanan publik	28.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
27.	RSUD Pratama Tapan	-	-	-	Tidak Input Inovasi	-
B.	KECAMATAN					
1.	Kecamatan IV Jurai	LEGO MENARI (Lewat Gotong Royong Membangun Nagari)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	97.00	Terkirim	13.01-145017-2024
2.	Kecamatan Lunang	LUNANG TERPADU	Inovasi pelayanan publik	94.00	Terkirim	13.01-143001-2023
3.	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Giatkan Cabang Olahraga Jauhi Narkoba (GACOR)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	93.00	Terkirim	13.01-114318-2023
4.	Kecamatan Koto XI Tarusan	PENA SIASAT	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	93.00	Terkirim	13.01-114318-2023
5.	Kecamatan Batang Kapas	Colek (Cek mOnitoring Lihat	Inovasi pelayanan	92.00	Terkirim	13.01-144148-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

REKAPAN DATA E-PPGBM (D/S) DAN BALITA STUNTING BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

Data Tanggal : 2025-09-04 10:17:09

No	Puskesmas	Sasaran Real	Jumlah Balita Ditimbang	% D/S	BB/U					TB/U					BB/TB					Stunting	%	Wasting	%	Underweight	%	Overweight	%		
					Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Outlier	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Outlier	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih									Obesitas	Outlier
1	TANJUNG MAKMUR	1.260	1.257	99,76	15	64	1.117	54	7	16	41	1.193	-	7	2	29	1.052	117	34	15	8	57	4,5	31	2,5	79	6,3	49	3,9
2	TANJUNG BERINGIN	1.493	1.485	99,46	14	70	1.308	82	11	16	55	1.395	6	13	18	48	1.102	231	60	11	15	71	4,8	66	4,4	84	5,7	71	4,8
3	TAPAN	1.239	1.228	99,11	11	43	1.101	12	1	13	41	1.171	1	-	2	19	1.130	33	3	1	3	66	1,1	31	1,7	51	1,1	3	0,2
4	RAHUL	1.263	1.242	98,34	3	11	1.207	10	11	1	26	1.205	4	6	3	2	1.217	6	2	-	12	27	2,2	5	0,4	14	1,1	2	0,2
5	INDRAPURA	1.720	1.699	98,78	9	50	1.565	68	7	6	47	1.615	23	8	11	49	1.541	78	9	2	9	53	3,1	60	3,5	59	3,5	11	0,6
6	PUSKESMAS AIRPURA	1.542	1.542	100,00	19	118	1.356	45	4	19	34	1.486	1	2	2	54	1.244	193	33	10	6	53	3,4	56	3,6	137	8,9	43	2,8
7	AIR HAJI	3.321	3.266	98,34	41	251	2.901	49	24	76	186	2.975	7	22	20	121	2.921	143	23	10	28	262	8,0	141	4,3	292	8,9	33	1,0
8	BALAI SELASA	1.759	1.734	98,58	16	89	1.578	39	12	14	66	1.628	15	11	14	95	1.521	76	8	3	17	80	4,6	109	6,3	105	6,1	11	0,6
9	KAMBANG	2.351	2.322	98,77	30	150	2.040	87	15	24	146	2.115	20	17	27	100	1.975	147	42	11	20	170	7,3	127	5,5	180	7,8	53	2,3
10	KOTO BARU	1.169	1.169	100,00	7	52	1.081	29	-	13	16	1.135	5	-	5	44	1.038	67	13	2	-	29	2,5	49	4,2	59	5,0	15	1,3
11	SURANTIH	2.746	2.742	99,85	30	225	2.420	64	3	41	172	2.519	10	-	9	146	2.422	128	24	10	3	213	7,8	155	5,7	255	9,3	34	1,2
12	KAYU GADANG	1.327	1.321	99,55	15	106	1.117	76	7	21	107	1.176	9	8	23	80	1.058	102	37	13	8	128	9,7	103	7,8	121	9,2	50	3,8
13	PASAR KUOK	1.440	1.409	97,85	11	117	1.238	40	3	26	73	1.305	5	-	4	103	1.140	121	29	9	3	99	7,0	107	7,6	128	9,1	38	2,7
14	IV KOTO MUDI	665	665	100,00	17	80	552	16	-	33	48	584	-	-	4	35	560	51	9	5	1	81	12,2	39	5,9	97	14,6	14	2,1
15	SALIDO	2.171	2.165	99,72	21	83	2.033	26	2	21	67	2.075	-	2	13	63	1.974	93	17	3	2	88	4,1	76	3,5	104	4,8	20	0,9
16	LUMPO	813	812	99,88	10	72	708	18	4	10	67	731	-	4	3	42	698	44	14	7	4	77	9,5	45	5,5	82	10,1	21	2,6
17	KOTO BERAPAK	1.149	1.055	91,82	21	109	884	38	3	28	28	993	3	3	6	69	898	59	14	6	3	56	5,3	75	7,1	130	12,3	20	1,9
18	PASAR BARU	1.510	1.389	91,99	12	145	1.163	53	16	26	53	1.293	12	5	11	112	1.140	79	22	8	17	79	5,7	123	8,9	157	11,3	30	2,2
19	ASAM KUMBANG	480	477	99,38	3	26	435	13	-	6	26	443	1	1	3	24	422	21	5	1	1	32	6,7	27	5,7	29	6,1	6	1,3
20	TARUSAN	2.287	2.276	99,52	51	290	1.850	85	-	39	219	2.006	12	-	21	132	1.898	163	52	10	-	258	11,3	153	6,7	341	15,0	62	2,7
21	BARUNG-BARUNG BELANTAI	1.424	1.422	99,86	1	94	1.276	34	4	30	96	1.288	4	4	7	68	1.208	111	20	3	5	126	8,9	75	5,3	108	7,6	23	1,6
JUMLAH		33.129	32.677	98,64	370	2.245	28.990	938	134	481	1.614	30.331	138	113	208	1.435	28.165	2.093	472	140	164	2.095	6,4	1.643	5,0	2.615	8,0	612	1,9
																						18,8			8		15		4



Di ketahui Oleh,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Agustina Rahmadani, S.ST.MM
NIP. 19790810 200312 2 006

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Pesisir Selatan

Apt. FITRIA, S. Farm
NIP. 19790203 200501 2 009

Painan, Agustus 2025
Penata Kelola Layanan Kesehatan



Meri Susanti
NIP. 19800909 2001001 008



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

Kecamatan Lunang

**Atas Pencapaian Nilai Kematangan Inovasi Tahun 2025
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor Registrasi (Kementerian Dalam Negeri) : 13.01-143001-2023**

Pesisir Selatan, 26 September 2025
Bupati Pesisir Selatan



H. HENDRAJONI